

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk provinsi, berupa perluasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang memasukkan kendaraan di atas air yang berpotensi di beberapa provinsi di luar pulau jawa, salah satunya di provinsi Sumatera Selatan. (Simanjuntak, 2001:4) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang mengenakan Pajak Kendaraan di Atas Air dan merupakan provinsi dengan pendapatan Pajak Kendaraan di Atas Air terbesar di Indonesia.

Ketentuan mengenai objek, subjek dan dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air sendiri di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan di Atas Air dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air, dan yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan di atas air tersebut.

Mengingat Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang dialiri sungai yaitu Sungai Musi. Sungai Musi telah menjadi bagian dari nafas kehidupan bagi penduduk Sumatera Selatan dimana berlangsungnya pusat kegiatan perekonomian, pariwisata dan perdagangan sehingga banyaknya kendaraan di atas air yang dipakai untuk menunjang semua kegiatan yang ada di Sungai Musi tersebut. Semakin banyaknya kegiatan yang beraktivitas, maka semakin banyak pula jumlah kendaraan di atas air yang dipergunakan. Dengan demikian usaha dengan menggunakan kendaraan ini memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan negara. Pajak Kendaraan di Atas Air merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai potensi cukup besar di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan asli suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan asli suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Penerimaan pajak kendaraan di atas air dapat dinyatakan efektif apabila realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan target dan realisasi pajak kendaraan di atas air di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan di Atas Air
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2011	211.000.000	191.950.125	90,97
2012	211.000.000	219.692.550	104,12
2013	211.000.000	202.550.725	96,00
2014	211.000.000	211.799.250	100,38
2015	211.000.000	259.995.983	123,22

Sumber : *DISPENDA* Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa realisasi Pajak Kendaraan di Atas Air di Sumatera Selatan pada lima tahun terakhir rata-rata telah mencapai target. Namun, terdapat realisasi Pajak Kendaraan di Atas Air yang belum mencapai target yaitu pada tahun 2011 sebesar 90,97% dan pada tahun 2013 sebesar 96%. Persentase dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan di Atas Air terlihat berfluktuasi di setiap tahunnya. Hal ini bisa disebabkan oleh target penerimaan yang tetap dari tahun ke tahun dan diharapkan pihak yang berwenang harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air agar dapat menaikkan target penerimaan pajak tersebut.

Dari uraian di atas, penulis bermaksud untuk meneliti sampai sejauh mana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan Pajak Kendaraan di Atas Air memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk Laporan Akhir yang berjudul *“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan di Atas Air pada Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas serta data yang telah diperoleh, maka permasalahan pokok yang ditemukan Penulis pada laporan akhir ini adalah:

1. Seberapa efektif penerimaan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) selama lima tahun terakhir di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan serta menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam menganalisa permasalahan ini difokuskan pada laporan

keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2011 s.d. tahun 2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk:

1. Mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) selama lima tahun terakhir di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan laporan akhir ini adalah :

1. Sebagai sumbang pengetahuan dalam meneliti hal yang berkaitan dengan analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan di atas air pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dapat dijadikan bahan bacaan atau referensi untuk mahasiswa, khususnya jurusan Akuntansi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas, Penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data agar diperoleh data yang objektif.

Metode pengumpulan data menurut Sugiono (2010:194) yaitu :

1. *Interview* (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data informasi yang diperlukan dalam penulisan.
2. *Kuisisioner* (angket), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3. *Observation* (pengamatan), yaitu teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner.

Berdasarkan metode pengumpulan data di atas, Penulis menggunakan metode *interview* (wawancara) dengan beberapa pihak yang berwenang dan melakukan *observation* (pengamatan) terhadap data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Jenis data menurut Supranto (2010:193) adalah sebagai berikut :

1. *Primary data* (data primer) merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau dikumpulkan oleh prorangan atau organisasi langsung melalui objeknya.
2. *Secondary data* (data sekunder) merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data atau diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.

Sumber data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan analisis penulis yaitu sumber data sekunder yaitu sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, pembagian tugas serta data laporan keuangan target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2011 s.d. tahun 2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, laporan ini terdiri dari lima bab dimana setiap bab memiliki hubungan antar satu dengan yang lainnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai rancangan sistematika penulisan laporan akhir ini, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab satu akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori dari literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah, mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan di atas air pada pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab III Gambaran Umum

Dalam bab ini akan disajikan hal-hal yang berhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, data target dan realisasi pendapatan daerah serta upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam pencapaian realisasi target.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab empat akan dibahas dan dijelaskan permasalahan mengenai efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan di atas air pada pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab V Penutup

Bagian ini merupakan bab terakhir yang akan mengemukakan kesimpulan dari penulisan Laporan Akhir ini, yang didalamnya terdapat inti permasalahan yang dihadapi dan dilanjutkan saran-saran yang dapat bermanfaat sebagai masukan bagi kemajuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.